

**STATUS APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIZKI PUJI NUR WAHYUDI**

**NIM : 2019010082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2024**

**STATUS APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**RIZKI PUJI NUR WAHYUDI**  
**NIM : 2019010082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK**

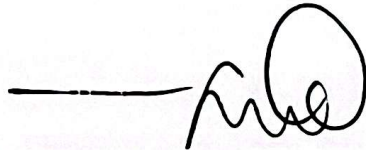
**2024**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Nama : Rizki Puji Nur Wahyudi  
NIM : 2019010082

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Gresik

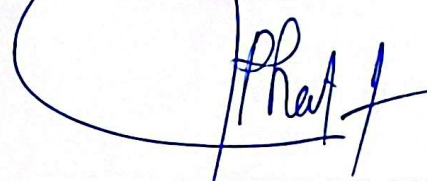
Pembimbing I



**Dr. H. SUYANTO. S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.**  
NIPY : 107102020140082

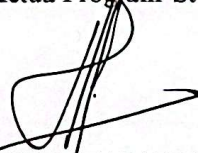
Gresik, Juni 2024

Pembimbing II



**PRIHATIN EFFENDI. S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**DARA PUSHTASARI S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Nama : Rizki Puji Nur Wahyudi  
NIM : 2019010082

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. **PRIHATIN EFFENDI. S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020120030  
Ketua.
2. **RIZKI KURNIAWAN. S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020070040  
Anggota.
3. **DWI WACHIDIYAH NINGSIH. S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020  
Anggota.


Mengetahui  
Dekan

  
**RIZKI KURNIAWAN. S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020070040



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : RIZKI PUJI NUR WAHYUDI
2. N.I.M : 2019010082
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
7. Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

| No | TANGGAL      | MATERI KONSULTASI  | PARAF PEMBIMBING I | PARAF PEMBIMBING II |
|----|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 13 - 12 - 23 | Judul              |                    |                     |
| 2  | 20 - 12 - 23 | Rumusan Masalah    |                    |                     |
| 3  | 28 - 12 - 23 | Metode Penelitian  |                    |                     |
| 4  | 04 - 01 - 24 | Metode Penulisan   |                    |                     |
| 5  | 10 - 01 - 24 | Pembahasan Bab I   |                    |                     |
| 6  | 04 - 06 - 24 | Pembahasan Bab II  |                    |                     |
| 7  | 05 - 06 - 24 | Pembahasan Bab III |                    |                     |
| 8  | 10 - 06 - 24 | Pembahasan Bab IV  |                    |                     |

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 10 Juni 2024
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 20 Juni 2024

Pembimbing I

DR. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.  
 NIPY : 107102020140082

Pembimbing II

PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.  
 NIPY : 107102020120030

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

DARA PUSPITASARI S.H., M.H.  
 NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Rizki Puji Nur Wahyudi  
NIM : 2019010082  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 13 Juli 2024  
Yang menyatakan,



RIZKI PUJI NUR WAHYUDI  
NIM : 2019010082

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Rizki Puji Nur Wahyudi  
NIM : 2019010082  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 13 Juli 2024  
Yang menyatakan,



*Rizki Puji Nur Wahyudi*  
RIZKI PUJI NUR WAHYUDI  
NIM : 2019010082

## **MOTTO**

*“Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya sendiri”*

**(Aristoteles)**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”*

**(B. J. Habibie)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku sayangi.

### **Orang Tua**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

### **Teman-temanku**

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

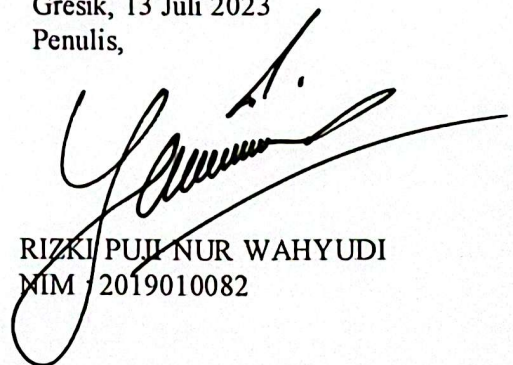
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P. Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua dan istri tercinta. Ibu, Ayah dan istri, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak dan suami, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 13 Juli 2023  
Penulis,



RIZKI PUJ NUR WAHYUDI  
NIM 2019010082

## ABSTRAK

Bahwa Perangkat Desa saat ini tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun demikian, terdapat kemiripan antara perangkat desa dan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut belum begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara *eksplisit* perihal status kepegawaian dari para perangkat desa., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus.

Kesimpulan yang didapat yaitu Aparatur Pemerintah Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati.

Kedudukan Aparatur Pemerintah Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa menjadikan Aparatur Pemerintah Desa tidak memiliki status kepegawaian. Tidak adanya status kepegawaian merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan utuh.

Saran penulis adalah Hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu juga mengatur keberadaan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bagian dari Sub Pemerintahan Nasional. Karena Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan administrasi, juga sebagai Sub Pemerintahan selain Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Hendaknya Pemerintah Pusat juga memperhatikan tunjangan yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Desa sangat berbeda jauh dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga sama-sama melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, oleh karenanya perlu adanya penetapan jumlah tunjangan yang lebih layak berdasarkan Upah Minimum Propinsi atau UMP atau UMR yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**Kata kunci : Perlindungan, Status Hukum, Aparatur Pemerintah Desa.**

## **ABSTRACT**

*That Village Officials are currently not included in Civil Servants (PNS) or Government Employees with Work Agreements (PPPK). However, there are similarities between village officials and ASN. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the employment status of these community servants is not yet clear. In these statutory regulations, it is not explicitly explained regarding the employment status of village officials. The formulation of the research problem is: What is the legal status of village government officials and what is the legal protection for village government officials. This type of research is normative juridical research, where the approach is towards problems by reviewing statutory, conceptual and case provisions.*

*The conclusion obtained is that Village Government Apparatus are not included in Civil Servants (PNS) or Government Employees with Work Agreements (PPPK), but include Employees appointed by the Village Head on the recommendation of the District Head on behalf of the Regent.*

*The position of Village Government Apparatus, namely as assistants to the Village Head in administering government which is subject to village autonomy, means that Village Government Apparatus do not have employment status. The absence of employment status is a form of returning to the essence of the village as a holder of original, complete and complete autonomy.*

*The author's suggestion is that Law Number 6 of 2014 concerning Villages should also regulate the existence of Village Government Apparatus as part of the National Sub-Government. Because Village Government Apparatus carries out administration, also as a Sub-Government apart from the Central Government and Regional Government and the Central Government should also pay attention to the allowances received by Village Government Apparatus which are very different from Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) which are They also both carry out government administrative duties, therefore it is necessary to determine a more appropriate amount of allowances based on the Provincial Minimum Wage or UMP or UMR determined by the Regent/Mayor.*

***Keywords: Protection, Legal Status, Village Government Apparatus***

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                               | <b>.....</b> |
| <b>HALAM COVER .....</b>                                  | <b>.....</b> |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....                        | iii          |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI .....                              | iv           |
| KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....                          | v            |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....                    | vi           |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....                      | vii          |
| MOTTO .....   | viii         |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                 | ix           |
| KATA PENGANTAR .....                                      | x            |
| ABSTRAK.....  | xii          |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                     | xiii         |
| DAFTAR ISI .....  | xiv          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....                                  | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                  | 8            |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                               | 8            |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                               | 9            |
| 1.5 Tinjauan Pustaka.....                                 | 9            |
| 1.5.1 Landasan Konseptual .....                           | 9            |
| 1.5.2 Landasan Yuridis.....                               | 17           |
| 1.5.3 Landasan Teori .....                                | 17           |
| 1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....              | 18           |
| 1.6 Metode Penelitian .....                               | 19           |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                              | 19           |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....                             | 20           |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                            | 21           |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum ..... | 23           |
| 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....                    | 24           |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                           | 26           |

|  |    |
|--|----|
| BAB II STATUS HUKUM APARATUR PEMERINTAH DESA YANG BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.....                     | 28 |
| 2.1 Pegertian Pemerintah Desa .....  | 28 |
| 2.2 Otonomi Desa .....   | 34 |
| 2.3 Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Kepegawaian.....  | 42 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DESA.....                                      | 49 |
| 3.1 Konsep Perlindungan Hukum Aparatur Pemerintah Desa .....   | 49 |
| 3.1.1 Aparatur Sipil Negara Sebagai Aparatur Pemerintah Desa .....                                     | 59 |
| 3.1.2 Aparatur Pemerintah Desa Bukan Aparatur Sipil Negara.....  | 62 |
| 3.2 Status Kepegawaian Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... | 66 |
| 3.3 Pegawai Pemerintah Desa dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .....                                       | 75 |
| BAB IV PENUTUP.....  | 78 |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 78 |
| 4.2. Saran .....   | 79 |
| Daftar Bacaan .....  |    |